

Penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) masing-masing tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020; penyelenggaraan kearsipan; dan penyelenggaraan kabupaten layak anak

Sesuai dengan agenda sidang paripurna pada 14 Juni lalu, H. Lalu. Pathul Bahri telah menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang naskah lengkapnya terdapat pada dokumen ranperda yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 2 Juni 2021 yang lalu.

Penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2020, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah berhasil melakukan penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah yang sangat berdampak terhadap ketepatan dan keakuratan penyajian nilai aset pada laporan keuangan pemerintah daerah. Perubahan regulasi tersebut dapat disikapi dengan cermat dan sigap

sehingga pemerintah kabupaten lombok tengah tetap dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia untuk ke 9 (sembilan) kalinya, yang pertama kali diraih pada tahun anggaran 2012. Tanpa bermaksud untuk membanggakan diri, apa yang telah diraih ini, merupakan hasil terbaik di lingkup pemerintah kabupaten/kota se-provinsi nusa tenggara barat. Atas capaian ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin daerah sebelumnya yang telah meletakkan pondasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kami dapat meneruskan, mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh anggota dprd yang terhormat yang dengan penuh totalitas telah mengawal apbd ini dengan baik sejak dari tahapan penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya, dan khususnya kepada seluruh jajaran perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten lombok tengah yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita harapkan laporan keuangan pemerintah daerah semakin

berkualitas dan bermanfaat dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengambilan keputusan di masa-masa yang akan datang.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menyajikan 7 jenis laporan, yaitu laporan realisasi anggaran (lra), laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal), neraca, laporan operasional (lo), laporan arus kas (lak), laporan perubahan ekuitas (lpe) dan catatan atas laporan keuangan (calk).

Penjelasan lebih lanjut mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, secara garis besarnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran

A. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 terealisasi senilai Rp.2.096.751.245.984,90 atau 98,98% dari

target penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp.2.118.248.698.538,12. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelompok pendapatan terhadap total pendapatan.

a. Pendapatan asli daerah (pad)

Pad yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah, tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 193.954.302.747,12 dan terealisasi sebesar Rp 206.419.405.625,90 atau sebesar 106,38% .

b. Pendapatan transfer

Pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, dengan obyek penerimaan dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana penyesuaian dan dana transfer pemerintah provinsi, dalam apbd tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 1.821.445.497.791,00 terealisasi senilai Rp 1.776.714.951.375,00 atau 97,54%.

c. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 102.848.898.000,00, terealisasi senilai Rp 113.616.888.984.,00 atau 110,47%.

2. Jenis pendapatan terhadap kelompok pendapatan

a. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari:

- pendapatan pajak daerah;

Pada APBD tahun anggaran 2020, realisasi pajak daerah sebesar Rp 55.498.799.502,42 atau sebesar 89,72% dari anggaran sebesar Rp 61.855.543.137,50 .

- pendapatan retribusi daerah;

Retribusi daerah ditargetkan senilai Rp 18.377.106.575,00 terealisasi senilai Rp 16.255.651.949,34 atau 88,46%.

- pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

Pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 10.067.928.721,62,00 terealisasi senilai Rp 10.339.359.321,62 atau 102,70%.

- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Pendapatan asli daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 103.653.724.313,62 terealisasi senilai Rp 124.325.594.852,52 atau 119,86%.

- b. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi NTB terdiri atas beberapa komponen pendapatan sebagai berikut ;

- Dana Bagi Hasil Pajak :

Bersumber dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan; bagi hasil PPh pasal 21, 25 dan 29 dan bagi hasil dari cukai hasil tembakau. Dianggarkan senilai Rp 74.302.857.000,00 terealisasi senilai Rp 69.408.291.903,00 atau 93,41%.

- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam);
Bersumber dari dana bagi hasil dari provisi sumber daya hutan, iuran tetap (*land-rent*), iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti), dan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan dianggarkan senilai Rp 15.965.498.000,00 terealisasi senilai Rp 13.167.851.706,00 atau 82,48%
- Dana Alokasi Umum (dau);
Dau merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 957.311.642.000,00 terealisasi senilai Rp 943.972.250.000,00 atau 98,61% .
- Dana Alokasi Khusus (dak);
Dak merupakan pendapatan dari pemerintah pusat secara khusus terdiri dari dak reguler, dak afirmasi, dak non fisik dan dak penugasan. Pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 453.322.947.000,00 terealisasi senilai Rp 437.303.374.823,00 atau 96,47%.

- Dana Penyesuaian;
Merupakan dana penyesuaian dana insentif daerah (did) dan dana desa pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 232.768.463.000,00 dan terealisasi seluruhnya atau 100%.
- pendapatan transfer pemerintah provinsi;
Dalam APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2020, pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, dianggarkan Rp 87.774.090.791,00 terealisasi senilai Rp 80.094.719.943,00 atau 91,25%.
- Lain-lain pendapatan yang sah.

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan lainnya, dalam apbd tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 102.848.898.000,00 terealisasi senilai Rp 113.616.888.984,00 atau 110,47%.

B. Belanja Daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa. Pada APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 2.168.825.114.595,87 terealisasi senilai Rp 2.093.636.570.402,34 atau 96,53%.

1. Kelompok Belanja Terhadap Total Belanja.

a. Belanja operasi.

Belanja operasi	dianggarkan	senilai	Rp
1.474.354.235.444,19,	terrealisasi	senilai	Rp
1.423.541.520.448,25 atau 96,55% .			

b. Belanja Modal.

Belanja modal	dianggarkan	senilai	Rp
296.918.348.467,68,	terrealisasi	senilai	Rp
282.545.185.043,79 atau 95,16% .			

c. Belanja Tak Terduga.

Belanja tak terduga dianggarkan senilai Rp
71.112.933.484,00 terealisasi senilai Rp
62.707.900.977,00 atau 88,18%.

d. Transfer/Bagi Hasil Ke Desa.

Transfer bagi hasil ke desa dianggarkan senilai Rp
326.439.597.200,00 terealisasi senilai Rp
324.841.963.933,00 atau 99,51%.

2. Jenis Belanja Terhadap Kelompok Belanja.

a. Belanja operasi, terdiri dari:

- Belanja pegawai;

Dianggarkan senilai Rp 835.410.625.375,59
terealisasi senilai Rp 821.708.778.149,00 atau
98,36%.

- Belanja barang;

Dianggarkan senilai Rp 388.250.593.389,60 terealisasi senilai Rp 355.709.216.838,10 atau 91,62%.

- Belanja bunga

Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 untuk membayar bunga atas pinjaman jangka panjang senilai Rp 4.767.062.477,00, terealisasi senilai Rp 4.608.264.725,00 atau 96,67%.

- Belanja hibah;

Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 244.277.263.202,00 terealisasi senilai Rp 239.873.015.424,15 atau 98,20%.

- Belanja Bantuan Sosial;

Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 1.648.691.000,00 terealisasi senilai Rp 1.642.245.312,00 atau 99,61%.

b. Belanja Modal

- Belanja tanah
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 5.965.542.852,36 terealisasi senilai Rp 4.581.679.709,00 atau 76,80%.
- Belanja peralatan dan mesin;
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 86.508.122.461,25 terealisasi senilai Rp 88.850.102.463,00 atau 102,71%.
- Belanja gedung dan bangunan;
Dalam APBD tahun anggaran 2020, belanja gedung dan bangunan dianggarkan senilai Rp 177.426.450.598,07 terealisasi senilai Rp 170.908.742.885,79 atau 96,33%.
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan;
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 12.830.345.346,00 terealisasi senilai Rp 10.015.713.500,00 atau 78,06%.
- Belanja aset tetap lainnya;

Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp 14.187.887.210,00 terealisasi senilai Rp 8.188.946.486,00 atau 57,72%.

C. Belanja tak terduga.

Realisasi belanja tak terduga senilai Rp 62.707.900.977, digunakan untuk penanganan bencana alam dan pandemi covid 19.

D. Belanja transfer/bagi hasil ke desa

Realisasi transfer bagi hasil ke desa terdiri dari realisasi bagi hasil pendapatan senilai Rp 6.416.522.803,00 atau 79,97% , dan realisasi bantuan keuangan senilai Rp 318.425.441.130,30 atau 100 % dari anggrannya.

C. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan bagian dari APBD yang mempunyai fungsi untuk menutupi defisit anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto pada apbd kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp 50.576.416.057,75 terealisasi senilai Rp 54.532.798.191,30 atau 107,39%.

Dari selisih antara pendapatan, belanja dan pembiayaan netto di atas, didapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) senilai Rp 57.647.473.773,86.

2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Ipsal) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih (sal) pada tahun pelaporan. Laporan perubahan sal tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo anggaran lebih awal senilai Rp 60.797.430.357,75 (dikurangi dengan penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp 64.943.602.769,30. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran senilai Rp 57.647.473.773,86, dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp 4.146.172.411,55, sehingga saldo anggaran lebih akhir senilai Rp 57.647.473.773,86.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, utang atau kewajiban dan ekuitas pada suatu periode tertentu. Pergeseran neraca awal per 1

januari 2020 menjadi neraca akhir per 31 desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Aset lancar.

aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara blud, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara bos, kas lainnya, piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, piutang lainnya, biaya dibayar di muka dan persediaan, per 31 desember 2020 seluruhnya senilai Rp 153.685.729.072,43.

B. Investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang merupakan nilai investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah kabupaten lombok tengah pada bumd; yaitu pt. Bank ntb cabang praya, pd. Bpr ntb lombok tengah, pdam tirta rinjani, dan pt. Jamkrida, seluruhnya senilai Rp 149.906.700.376,35.

C. Aset tetap

Nilai aset tetap pemerintah kabupaten lombok tengah berupa aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan per 31 desember 2020 seluruhnya senilai Rp 2.877.776.085.909,65.

D. Aset lainnya

Nilai aset lainnya pemerintah kabupaten lombok tengah berupa aset tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain per 31 desember 2020 secara keseluruhan senilai Rp 45.998.426.050,26.

e. Kewajiban.

Kewajiban merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten lombok tengah terhadap pembayaran utang kepada pihak ketiga baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Pemerintah kabupaten lombok tengah per 31 desember 2020, memiliki kewajiban senilai Rp 85.679.983.584,22 (.).

F. Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah kabupaten lombok tengah per 31 desember 2020 senilai Rp 3.141.686.957.824,47.

G. Kewajiban dan ekuitas

Merupakan jumlah dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang ditambah ekuitas, seluruhnya senilai Rp 3.227.366.941.408,69.

4. Laporan operasional

Laporan operasional (lo) tahun 2020 terdiri dari pendapatan-lo, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa dan surplus/defisit-lo sebagai berikut :

A. Pendapatan-lo

Pendapatan - lo adalah pendapatan untuk periode 1 januari 2020 sampai dengan tanggal 31 desember 2020 senilai Rp 1.874.301.621.901,03 dengan rincian pendapatan asli daerah-lo senilai Rp 197.626.711.492,03. Pendapatan transfer-lo senilai Rp 1.559.436.921.816,00 dan lain-lain pendapatan yang sah-lo senilai Rp 117.237.988.593,00.

B. Beban

Beban operasional yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan selama tahun 2020 seluruhnya senilai Rp 1.714.580.616.636,69. Dengan demikian terdapat surplus operasional tahun anggaran 2020 senilai Rp 159.721.005.264,34.

C. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional

Defisit dari kegiatan non operasional terjadi defisit senilai Rp 24.746.081.490,03.

D. Pos luar biasa

Pos luar biasa merupakan beban yang ditanggung pemerintah dalam menghadapi kejadian luar biasa berupa tanggap darurat bencana, atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. Beban pos luar biasa pada tahun anggaran 2020 senilai Rp 50.856.032.732,00. Sehingga dengan demikian terdapat surplus laporan operasional tahun anggaran 2020 senilai Rp 84.118.891.042,31.

Komponen laporan keuangan pemerintah kabupaten lombok tengah berikutnya adalah laporan arus kas.

5. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2020 yang diklasifikasi berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut :

A. Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 276.493.470.851,90.

B. Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih dari aktivitas investasi defisit senilai Rp 273.465.450.228,79.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan defisit senilai Rp 10.410.804.578,00.

d. Arus kas dari aktivitas transitoris

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris senilai Rp 1.124.404.746,15.

E. Kenaikan (penurunan) kas.

Berdasarkan arus kas bersih aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, arus kas bersih aktivitas pendanaan dan arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 desember 2020, terdapat penurunan nilai kas dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai Rp 6.258.379.208,74.

F. Saldo awal kas

Saldo kas per 1 januari 2020 adalah senilai Rp 60.991.953.238,60.

G. Saldo akhir kas

Saldo akhir kas per 31 desember 2020 senilai Rp 58.881.878.624,32 terdiri atas kas di kas daerah senilai Rp 43.599.132.435,61, kas di bendahara pengeluaran senilai Rp 1.981.681.073, kas di bendahara blud rsud senilai Rp 5.292.708.526,14, kas di bendahara fktf senilai Rp 5.822.615.726,96, dan kas di bendahara bos senilai Rp 2.185.740.862,61.

6. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca yang menunjukkan terjadinya perubahan ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Dari laporan ekuitas tahun 2020 yang telah disusun, diketahui bahwa terjadi kenaikan ekuitas atau kekayaan bersih sebesar 2,91% (dua koma sembilan puluh satu persen) dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya tentang ranperda penyelenggaraan kearsipan. Bahwa sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis, maka arsip semakin memiliki peran strategis ketika dikaitkan dengan penerapan prinsip *good government* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Institusi negara, termasuk pemerintahan daerah sebagai alat utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa, senantiasa memerlukan arsip dalam setiap langkah kehidupannya.

Untuk itu, kebutuhan akan arsip yang memiliki nilai *autentisitas* dan *reliabilitas* menjadi hal yang tidak terelakkan.

Dengan demikian, pada skala pemerintahan, pengelolaan arsip secara terpadu sebagai suatu sistem merupakan upaya untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

Pada kondisi empiris yang terjadi bahwa penyelenggaraan kearsipan di kabupaten lombok tengah sampai saat ini belum semuanya dapat berjalan sesuai yang diinginkan, hal ini nampak dari banyaknya permasalahan dalam pengelolaan arsip seperti arsip sulit ditemukan, menumpuknya arsip, sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya kearsipan yang masih kurang, pembinaan kepada perangkat daerah yang belum maksimal, penetapan kebijakan tingkat daerah kabupaten lombok tengah yang belum dilaksanakan, dan masalah lainnya.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan di kabupaten lombok tengah masih jauh dari sempurna sehingga rencana pembentukan peraturan daerah yang akan mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif di kabupaten lombok tengah akan bisa menjawab sebagian persoalan menyangkut hal tersebut, yaitu terciptanya tata kelola yang baik dalam bidang pengelolaan dan

pelayanan atas penyelenggaraan kearsipan di setiap organisasi pemerintahan yang berkualitas.

Berikutnya, terkait ranperda penyelenggaraan kabupaten layak anak. Bahwa kota layak anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media masa yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Terwujudnya kabupaten yang layak anak merupakan salah satu tujuan besar pembangunan yang dikejar oleh pemerintah baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, juga menjadi dambaan masyarakat, hal ini karena kabupaten layak anak merupakan upaya dalam pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan, anak layak mendapatkan hak-hak dasar mereka yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Dalam kapasitas dan wewenangnya masing-masing, pemerintah, komunitas, sekolah, dan keluarga wajib mengupayakan ruang-ruang terbaik bagi pemenuhan hak-hak dasar ini.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam uu perlindungan anak. Uu pemda dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Untuk itulah dalam hal ini pemerintah kabupaten lombok tengah hadir sebagai *khadam* dalam rangka melindungi anak-anak, dengan membuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya pemenuhan hak-hak anak.

Hadirnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten layak anak akan berdampak positif bagi anak yang secara psikologis karena berhubungan dengan mencegah terjadinya kekerasan anak, tumbuh kembang anak dan terpenuhinya hak-hak anak.

Dengan demikian keberadaan kabupaten layak anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta sekaligus untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, perlu untuk segera diwujudkan.

Demikianlah penjelasan pemerintah daerah terhadap sejumlah ranperda yang telah disebutkan. Untuk selanjutnya diharapkan ranperda ini dapat dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mendapat persetujuan, dan pada akhirnya dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah kabupaten lombok tengah.

“Atas perhatian, kerjasama dan dukungan yang baik dari ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota dewan yang terhormat, serta seluruh masyarakat kabupaten lombok tengah kami sampaikan terima kasih. Semoga allah swt selalu melimpahkan taufik serta hidayahnya, dan memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam mengemban amanah dan tanggungjawab membangun lombok tengah bersatu jaya” tutupnya.